

**TATA KELOLA SAMPAH DI KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT  
KABUPATEN SIAK TAHUN 2020-2021**

**Oleh : Ida Yulia**

**Email: [ida.yulia0257@student.unri.ac.id](mailto:ida.yulia0257@student.unri.ac.id)**

**Pembimbing: Dr. Ali Yusri, MS**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*The waste problem is one of the problems that often arises in communities, both urban and in rural areas in overcoming this problem, the village of Pinang Sebatang Barat forms Village-Owned Enterprises or commonly abbreviated as BUMDes is a mandate of Law Number 6 of 2014 Article 87 which states that BUMDes are formed on the basis of the spirit of family and mutual cooperation to utilize all economic potential, natural resources and human resources to improve the welfare of rural communities. BUMKam tua negeri formed a waste transportation unit in order to assist the village government in realizing a clean village that will become a tourist village but in the waste management of BUMKam Tua Negeri Kampung Pinang Sebatang Barat there are problems such as the governance of BUMKam Tua Negeri which still does not carry out supervision, transparency, accountability. The problem found in the field is that there is community opposition regarding the accumulation of garbage that the transport car is damaged and without any temporary unit changes. The purpose of the study was to analyze the implementation of waste governance principles by BUMKam Tua Negeri in Kampung Pinang Sebatang Barat and to determine the constraints of waste management in Kampung Pinang Sebatang Barat in 2020-2021 in Siak Sri Indrapura regency. In this study, using the theory of good governance according to Mardiasmo because of these four principles, namely: The Rule of Law, Democracy, Transparency, and Accountability. This research method uses a qualitative approach in its research, where data sources are obtained using 3 ways, namely observation, interviews and documentation.*

*The results of this study show that by using the theory of good governance accountability implemented by BUMKam tua negeri is just reporting without a feed back regarding the truth of the data provided, in transparency BUMKam tua negeri has not opened financial data to the public either by using banners or other media to provide information to the public. In terms of democracy, BUMKam tua negeri gives freedom to the community to play a role in the progress of BUMKam tua negeri, especially the waste transportation unit. The rule of law of BUMKam tua negeri together with the village government has made village regulations that become a reference in running BUMKam tua negeri. Some of the obstacles that affect the implementation of BUMKam tua negeri run the implementation of good governance principles, namely capital and human resources.*

**Keywords: Governance, BUMKam, Waste**

## PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa desa harus dilindungi dan diberdayakan agar semakin kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 yang mengatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur masyarakat sesuai dengan prakarsa masyarakat. Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disingkat menjadi BUMDes adalah amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola dari masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan upaya untuk meningkatkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan yang menyesuaikan dengan seluruh potensi desa. Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 87 yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Kampung Tuah Negeri berdiri pada tahun 2011 yang diresmikan oleh bapak sekretaris BPMPD Kab.Siak Drs.Ikhwanudin,MPd tepatnya pada tanggal 31 Januari 2011 yang mana pada awalnya pembentukan BUMkam ini dilatar belakangi kondisi keuangan kampung yang bersumber dari pendapatan asli kampung yang sangat minim dan melihat potensi yang ada di kampung juga cukup besar maka disepakati untuk dibentuknya Badan Usaha Milik Kampung Tuah Negeri. Pada Badan Usaha Milik Kampung Tuah Negeri mendapatkan modal awal yang berasal dari anggaran APBD Kabupaten Siak yang berjumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang mana dana ini merupakan dana bergulir.

Jenis unit usaha yang dijalankan BUMkam Tuah Negeri ada 3 unit usaha yaitu simpan pinjam, BRI Link dan mobil sampah. Dalam unit usaha simpan pinjam merupakan unit usaha BUMkam penyalur pendapatan terbanyak yang dapat meningkatkan perekonomian kampung dengan dana yang telah disalurkan sebanyak 4 miliar hanya sebanyak 5.237 penduduk didesa Pinang Sebatang Barat yang menggunakan BUMkam Tuah Negeri.

Sementara itu unit usaha BRI Link dimana juga merupakan salah satu penyumbang pendapatan BUMKam Tuah Negeri sudah memiliki dana 50 juta yang dikelola untuk membantu masyarakat dalam pembayaran, pengambilan uang dan transfer uang menggunakan BRI Link yang dikelola BUMKam Tuah Negeri. Tidak hanya unit usaha BRI link, dan simpan pinjam saja yang menjadi unit pendapatan BUMKam Tuah Negeri, namun ada unit pengelolaan sampah yang juga penyumbang pendapatan desa. Unit usaha mobil sampah ini merupakan unit usaha yang mana dapat membantu masyarakat dalam pembuangan limbah rumah tangga yang ada disetiap KK dibantu untuk dibawa ke pembuangan akhir.

Mobil sampah yang merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMKam Tuah Negeri sudah berjalan dari tahun 2019 yang mempekerjakan 3 orang, mobil yang digunakan yaitu mobil L300. Pada unit usaha mobil sampah ini BUMKam Tuah Negeri sudah bekerjasama dengan setiap RT yang ada di kampung Pinang Sebatang Barat dengan jumlah sampah yang diangkut sebanyak 5 ton perhari dari 424 KK, jadwal pengangkutan sampah 2 kali dalam seminggu yaitu hari senin dan kamis. Dalam pemungutan iuran sampah BUMKam Tuah Negeri bekerjasama dengan RT untuk memungut iuran kepada warga yang ada setelah itu diberikan kepada BUMKam Tuah Negeri. Sampah yang diangkut dipisahkan menurut jenisnya yang mana sampah plastik akan dipisahkan dengan sampah nonorganik untuk dijual kembali sementara itu sampah organik dibuang ke TPA (tempat pembuangan akhir).

Unit angkutan sampah dimulai dari tahun 2019 hingga sekarang dengan penanggung jawab Deshendri pada sebelumnya di pegang oleh sukur, unit angkutan sampah ini memberikan lowongan kerja kepada 3 pekerja dari pembawa mobil

dan pengangkut sampah yaitu Deshendri, Dajur dan Alex menggunakan satu mobil yaitu mobil L300 dengan gaji harian 130.000/H. pengangkutan sampah ini dilakukan dari rumah kerumah warga yang menggunakan jasa angkutan sampah ini, jadwal pengangkutan sampah ini pada hari senin dan minggu yang dimulai dari pukul 08.00 wib hingga 17.00 wib. Sampah yang diangkut lalu diantarkan ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada di desa Perawang Barat. Dalam setiap pengangkutan sampah, jumlah sampah yang diangkut sekitar 5 ton, mulai dari sampah rumah tangga, warung/kedai harian dan rumah makan. Jika terdapat kendala seperti mobil mengalami kerusakan, maka pengangkutan sampah akan tertunda sampai mobil yang rusak telah diperbaiki. Sehingga membuat warga protes akibat sampah yang menumpuk dirumah mereka.

Untuk masyarakat yang menggunakan jasa angkutan sampah ini terbagi atas beberapa kelompok yaitu:

1. Sampah rumah tangga  
Rp.15.000/perbulan
2. Sampah warung Rp.20.000/perbulan
3. Sampah rumah makan  
Rp.25.000/perbulan
4. Sampah pabrik Rp.500.000/perbulan

Keberadaan BUMkam dapat membantu masyarakat untuk bisa menambahkan pendapatan mereka dan bisa mensejahterakan masyarakat disekitar. Namun dibalik manfaat yang ada tidak sedikit dari itu permasalahan yang ada seperti tata kelola unit angkutan sampah yang belum berjalan dengan baik seperti pada pengawasan, transparansi, apakah sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan visi misi BUMKam itu sendiri, masih adanya penumpukan sampah dimasyarakat yang mana mobil sampah tidak mengambil sampah sesuai jadwal yang telah disepakati sehingga menumpuk

sampai 1 minggu atau 2 minggu lamanya disebabkan kurangnya unit pengangkut sampah, pekerja yang tidak menjaga keselamatan sesama maupun dengan masyarakat dengan adanya kejadian salah satu pekerja yang terkena lemparan bak sampah hingga kepala berdarah, dan masih banyak masyarakat yang belum menggunakan jasa angkutan sampah sehingga masih banyak warga yang membuang sampah di perkebunan sawit yang ada disekitar lingkungan mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau dalam bentuk hitungan dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkahlaku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif sendiri. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur melalui pendekatan kuantitatif (saryono,2010). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang dilakukan untuk mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara factual, sistematis dan akurat. Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini untuk mencari informasi factual yang mendekati gejala yang ada. Mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung serta mengetahui secara langsung yang

dikerjakan orang dalam menangani masalah atau situasi yang sama. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif ini memungkinkan penulis mengkaji lebih mendalam mengenai Tata Kelola sampah di kampung Pinang Sebatang Barat Kabupaten Siak.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data yakni berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Ghony, 2016). Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penelitian deskriptif merupakan teknik untuk mendapatkan informasi mengenai tata kelola sampah di kampung Pinang Sebatang Barat kabupaten Siak.

Lokasi penelitian ini dilakukan adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi yang menjadi tempat penelitian berlokasi di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu :

### **A. Data Primer**

Menurut Husein Umar (2013:42) data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer adalah data yang didapatkan melalui wawancara responden tentang hal yang berkaitan dengan tata

kelola sampah di kampung Pinang Sebatang Barat kabupaten Siak.

1. Pimpinan BUMKam Tuah Negeri Kampung Pinang Sebatang Barat
2. Penanggung jawab unit angkutan sampah
3. Pekerja unit pengelolaan sampah
4. Masyarakat kampung Pinang Sebatang Barat

#### B. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012:141) mendefinisikan data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku serta dokumen. Dalam penelitian ini data yang tertulis berupa struktur BUMKam Tuah Negeri kampung Pinang Sebatang Barat.

A. Data-data jumlah KK yang bekerjasama dengan unit pengelolaan sampah

B. Peraturan pembentukan BUMKam Tuah Negeri

Penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan karakteristik atau kebutuhan penelitian. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample dimana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian.

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

##### A. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:317) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Kegiatan wawancara melibatkan empat komponen yaitu isi pertanyaan, pewawancara, responden dan situasi wawancara (Sudjana,2006).

##### B. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:329) teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengetahui seluruh kondisi melalui tulisan, gambar dari seseorang.

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi, saat melakukan sesuatu penelitian kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. Ada 4 komponen proses analisis data menurut miles dan huberman ( dalam rohmadi dan nasucha,2015:87-88) yaitu:

#### a. Pengumpulan data

Data yang di dapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di catat pada catatan lapangan yang terdiri atas 2 bagian yaitu bagian deskriptif dan bagian reflektik. Catatan reflektik adalah catatan yang isinya kesan, pendapat, komentar serta taksiran peneliti mengenai apa penemuan yang di jumpai.

#### b. Reduksi data

Setelah data terkumpul dibuat reduksi data untuk menentukan data yang relevan dan mempunyai makna, memfokuskan data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya melakukan penyederhanaan serta menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting mengenai hasil penemuan dan maknanya. Dalam proses reduksi data hanya temuan data atau temuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang direduksi. Sedangkan data yang tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian dibuang.

Dengan kata lain reduksi data dipakai untuk analisis yang mengarahkan, menggolongkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting dan mengorganisasikan data. Dengan begitu akan mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan.

#### c. Penyajian data

Penyajian data bisa berbentuk tulisan, gambar, table atau grafik. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi. Dalam hal ini supaya peneliti tidak mengalami kesulitan dalam penguasaan informasi secara baik dan menyeluruh dan juga bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Maka dari itulah peneliti harus membuat naratif, grafik atau matrik untuk mempermudah penguasaan data atau informasi tersebut.

#### d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama berlangsungnya penelitian seperti halnya proses reduksi data sesudah data telah terkumpul memadai maka akan dapat diperoleh kesimpulan sementara, dan sesudah data benar-benar lengkap maka dapat diperoleh kesimpulan akhir.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang ada diteliti dengan data yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. AKUNTABILITAS

Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara

bertanggung jawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan struktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindari penyalahgunaan wewenang.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan BUMKam Tuah Negeri khususnya pengelolaan unit angkutan sampah pelaporan pertanggung jawaban kinerja setiap bulannya di laporkan kepada pemerintah desa maupun pengawas BUMKam.

Pelaporan kinerja dan keuangan merupakan salah tanggung jawab dalam menjalankan organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Dalam penyelenggaraan BUMKam Tuah Negeri pengelolaan yang dilakukan telah berjalan dengan baik dalam pertanggung jawabannya untuk melaporkan kinerja dan anggaran yang dikelola agar tidak terjadi penyelewengan yang tidak sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat. Pelaporan yang terkait kinerja, keuangan telah dilakukan oleh BUMKam Tuah Negeri kepada pemerintah kampung dan kecamatan Tualang agar tidak terjadi penyelewengan yang akan merugikan BUMKam dan masyarakat secara umum.

Dalam halnya akuntabilitas yang telah dilaksanakan oleh BUMKam Tuah Negeri hanya sekedar pelaporan kepada atasan tanpa adanya verifikasi data yang sesuai dengan standar prosedur yang mana indikator akuntabilitas yang digunakan dari BAPPENAS ada 3 yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dan adanya output dan outcome yang terukur. Dalam hal ini BUMKam Tuah Negeri hanya melaksanakan pelaporan kinerja dan

pelaporan keuangan kepada atasan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan saja tanpa ada output yang diberikan dari pemerintah desa dan pemerintah kecamatan baik itu sanksi maupun reward seperti yang dijelaskan oleh direktur BUMKam Buah Negeri.

Dalam prinsip Akuntabilitas penyelenggaraan BUMKam Buah Negeri di kampung Pinang Sebatang Barat penyelenggaraannya belum berjalan dengan baik yang mana pelaporan yang dilakukan oleh BUMKam Buah Negeri tidak adanya feed back dari pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Pengawasan BUMKam Buah Negeri belum dapat bekerja dengan maksimal untuk mengawasi BUMKam Buah Negeri dalam penyelenggaraan unit dan penggunaan dana yang mana pengawas hanya sebagai pelengkap struktur BUMKam Buah Negeri tanpa peran aktif yang baik

## 2. TRANSPARANSI

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya BUMKam Buah Negeri harus mau memberikan informasi tentang BUMKam dan tidak mempersulit dalam perolehan informasi tersebut.

Dalam hal transparansi pengelolaan BUMKam Buah Negeri dilihat dari hasil analisis dilapangan tidak adanya spanduk pelaporan keuangan yang dapat dilihat oleh masyarakat untuk diketahui oleh masyarakat, spanduk pelaporan anggaran

tidak dipajang oleh pengelola BUMKam Buah Negeri sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat luas, transparansi yang pengelola BUMKam Buah Negeri artikan sebagai pelaporan kepada pemerintah kampung, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten tidak melaporkannya kepada masyarakat luas dengan membuat spanduk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMKam Buah Negeri. Dalam indicator transparansi yang disusun BAPPENAS yang pertama tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik dan indicator yang kedua yaitu adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu namun BUMKam Buah Negeri belum melaksanakan transparansi sesuai indicator yang disusun oleh BAPPENAS seperti peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, website, iklan layanan masyarakat, media cetak, dan papan pengumuman sesuai dengan hasil wawancara bersama dengan Direktur BUMKam Buah Negeri.

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance* yang belum dijalankan dengan baik oleh BUMKam Buah Negeri, transparansi mengenai keterbukaan informasi mengenai kegiatan dan keuangan BUMKam Buah Negeri tidak dapat dilihat oleh masyarakat luas yang disebabkan oleh BUMKam Buah Negeri tidak melaporkan kepada masyarakat melalui spanduk ataupun media lain untuk di ketahui oleh masyarakat luas. Pembuatan spanduk, website dan media lainnya merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan *good governance* yang didukung dengan indicator yang disusun Oleh BAPPENAS.

## 3. DEMOKRASI

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.

BUMKam Buah Negeri dalam penyelenggaraan pengelolaan seluruh unit yang ada khususnya unit angkutan sampah seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama, mendapatkan hak yang sama dan memiliki kewajiban yang sama dalam menikmati unit angkutan sampah BUMKam Buah Negeri. Seluruh masyarakat dapat memberikan saran dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan BUMKam Buah Negeri.

Dalam hal partisipasi masyarakat kampung Pinang Sebatang Barat masih bersikap acuh yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah desa dan BUMKam itu sendiri untuk menjalankan unit usaha yang ada seperti yang dijelaskan oleh penghulu kampung Pinang Sebatang Barat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kampung dan BUMKam Buah Negeri tidak berjalan dengan baik yang mengakibatkan sebagian masyarakat kampung Pinang Sebatang Barat tidak mengetahui adanya unit angkutan ini.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kampung dan BUMKam untuk memperkenalkan unit angkutan ini masih terbilang kurang, yang mengakibatkan masyarakat tidak banyak yang mengetahui adanya penyewaan mobil bak dan tidak banyak masyarakat yang menyewa angkutan yang disediakan oleh BUMKam Buah Negeri.

Setelah digantinya unit usaha angkutan umum menjadi angkutan sampah, sosialisasi yang dilakukan pemerintah

kampung dan BUMKam masih tetap tidak berjalan dengan baik. Masih banyak masyarakat kampung yang belum bergabung untuk menggunakan jasa angkutan sampah ini.

Selain dari masyarakat yang ikut menggunakan jasa angkutan sampah ada juga masyarakat yang tidak menggunakan jasa angkutan sampah dari BUMKam Buah Negeri yang mana dari 658 kk yang terdaftar di kampung Pinang Sebatang Barat yang menggunakan jasa angkutan sampah sebanyak 424 kk dalam artian ada 234 kk yang tidak ikut serta dalam menggunakan jasa angkutan sampah yang dikelola oleh BUMKam Buah Negeri.

Sosialisasi terkait dengan pembuangan sampah sembarangan, pembakaran sampah di lingkungan tempat tinggal yang akan mencemari lingkungan dan kesehatan harus dilakukan oleh pemerintah kampung Pinang Sebatang Barat agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pembakaran sampah di lingkungan tempat tinggal dan ikut serta dalam penggunaan unit angkutan sampah dari BUMKam Buah Negeri. Edukasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai sampah akan berdampak besar kepada lingkungan dan badan usaha kampung yang akan menambah masyarakat yang menjadikan unit angkutan sampah dari BUMKam Buah Negeri menjadi pilihan untuk membuang sampah ke tempat pembuangan akhir.

#### 4. *RULE OF LAW*

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan BUMKam Buah Negeri kampung Pinang Sebatang Barat pemerintah kampung dan pengelola BUMKam Buah Negeri menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Desa/Kampung Pinang Sebatang Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendirian Badan Usaha Miliki Desa/Kampung Pinang Sebatang Barat pengganti Peraturan Desa/Kampung Pinang Sebatang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa/Kampung Pinang Sebatang Barat dan pengesahan perubahan anggaran dasar BUM DESA/KAMPUNG Pinang Sebatang Barat sebagai dasar menjalankan seluruh unit untuk mencapai visi dan misi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kampung Pinang Sebatang Barat. BUMKam Buah Negeri menjalankan unit angkutan sampah berdasarkan Keputusan Direktur Bumkampung Buah Negeri Nomor 05/SK/KPTS/BUMKTM/X/2019 Tentang pembentukan unit jasa angkutan umum pada BUMKampung Buah Negeri sebagai landasan penyelenggaraan unit angkutan sampah.

Mengenai pengelolaan BUMKam Buah Negeri berdasarkan teori dari Mardiasmo mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan seperti Akuntabilitas, Transparansi, Demokrasi Dan Aturan Hukum BUMKam Buah Negeri telah melaksanakan semua yang indicator yang ada walaupun tidak sempurna dalam pelaksanaannya. Dalam Transparansi BUMKam Buah Negeri belum melaksanakan secara penuh indicator transparansi dan hanya melaksanakan pelaporan kinerja dan keuangan kepada pemerintah desa dan pemerintah kecamatan tanpa memberikan informasi secara luas kepada masyarakat melalui spanduk atau media lainnya agar dapat diketahui secara luas. Sementara itu dalam indicator demokrasi BUMKam Buah

Negeri tidak membeda-bedakan masyarakat melalui jenis kelamin, tingkat perekonomian namun dalam tingkat partisipasi masyarakat masih sangat minim keterlibatannya dalam penyelenggaraan BUMKam baik dalam rapat BUMKam maupun penyelenggaraan dilapangannya. Masyarakat masih belum berperan aktif dalam penyelenggaraan BUMKam dan memberikan sepenuhnya kepada direktur dan anggotanya untuk menjalankan BUMKam.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pengelolaan BUMKam Buah Negeri kampung Pinang Sebatang Barat masih ada terkendala dalam menjalankan unit usahanya yang tidak saja terjadi di kampung Pinang Sebatang Barat namun juga terjadi di banyak desa dengan permasalahan yang hampir sama seperti sumber daya manusia yang masih belum mumpuni, modal yang masih kecil dan lainnya. dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan kendala yang ditemui dalam pengelolaan unit usaha angkutan sampah milik BUMKam Buah Negeri kampung Pinang Sebatang Barat.

## 1. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pengelolaan suatu usaha yang membutuhkan sumber daya manusia yang banyak tidak semua memiliki keahlian yang sama dan memiliki keilmuan yang sama, ada sumber daya manusia yang unggul namun ada juga sumber daya manusia yang masih perlu meningkatkan keahlian dan keilmuannya seperti yang terjadi di kampung Pinang Sebatang Barat yang mana BUMKam Buah Negeri juga memiliki permasalahan dalam sumber daya manusia.

Untuk pekerja di lapangan yang bertugas mengambil sampah di rumah-rumah warga sering terjadi pergantian

personil yang diakibatkan oleh pekerja yang tidak betah dengan system kerja seminggu dua kali yang di terapkan dengan pendapatan 150.000 perhari kerja. Ini yang menjadikan seringnya pergantian personil di lapangan.

## 2. MODAL

Modal merupakan hal yang penting dalam membangun usaha selain sumber daya manusia modal menjadi salah satu kunci dalam membangun usaha seperti yang dilakukan BUMKam Buah Negeri, dalam pengelolaan unit angkutan sampah kampung Pinang Sebatang Barat modal yang paling utama yaitu mobil L300 yang mana BUMKam Buah Negeri memiliki 1 unit mobil bak untuk mengangkut sampah.

Mobil yang digunakan dalam pengangkutan sampah di kampung Pinang Sebatang Barat terkadang mengalami kerusakan yang membuat pengangkutan sampah tidak dapat dilakukan dan harus mengganti jadwalnya yang mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di rumah-rumah warga.

Kerusakan mobil yang dapat terjadi kapan pun akan menyebabkan penumpukan sampah yang ada di rumah-rumah warga dikarenakan apabila terjadi kerusakan mobil pengangkut sampah BUMKam Buah Negeri tidak memiliki pengganti untuk mengangkut sampah dan harus menunggu mobil kembali bisa dioperasikan. Kendala inilah yang pernah terjadi yang mana mobil pengangkut sampah mengalami kerusakan dan sampah-sampah di rumah-rumah warga tidak dapat diangkut dan terjadi penumpukan yang mengakibatkan bau busuk disekitar rumah warga, seharusnya pemerintah kampung dan BUMKam Buah Negeri mencari jalan keluarnya seperti pengadaan mobil angkutan sampah atau melakukan penyewaan armada apabila

terjadi kerusakan pada mobil angkutan sampah milik kampung.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pelaksanaan prinsip tata Kelola oleh BUMKam Buah Negeri Kampung Pinang Sebatang Barat dalam pengelolaan sampah tahun 2020-2021, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip tata kelola menurut Mardiasmo ada 4 prinsip yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Demokrasi, dan Aturan Hukum dapat disimpulkan bahwasanya BUMKam Buah Negeri telah menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik walaupun dalam penyelenggaraannya masih ada poin-poin yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya seperti menampilkan pengelolaan dana dapat dilaporkan kepada masyarakat luas melalui pembuatan spanduk yang diletak di kantor desa dan tempat-tempat strategis yang dapat dilihat oleh masyarakat luas. Sementara itu pada poin prinsip demokrasi BUMKam Buah Negeri telah menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama di BUMKam Buah Negeri, namun dalam poin partisipasi yang termasuk kedalam indikator demokrasi sesuai dengan yang ada didalam teori Mardiasmo masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh dengan keberadaan BUMKam Buah Negeri yang menyerahkan sepenuhnya kepada pegawai bumkam untuk mengelola. Dalam prinsip akuntabilitas BUMKam buah negeri hanya melaporkan kegiatan setahun yang dilaksanakan oleh BUMKam buah negeri kepada pemerintah desa dan pemerintah kecamatan tanpa adanya timbal balik dari pemerintah desa dan pemerintah kecamatan baik itu reward ataupun sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia thafana,Dkk. “Dampak keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (studi pada badan usaha milik desa (BUMDes) di desa ponggok, tlogo, ceper dan manjungan kabupaten klaten)”. *Reviu akuntansi dan bisnis Indonesia*, Vol. 4 No. 1, halaman 43-55, juli 2020
- Alfi S. (2020) “STRATEGI KEBERHASILAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) AMANAH SEJAHTERA DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN SINGINGI HILIR.” *Jom unri*
- Arindhawati, Aulia Tafhana, and Evy Rahman Utami. 2020. “Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper Dan Manjungan Kabupaten Klaten).” *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*. doi: 10.18196/rab.040152.
- Almanshur dan ghony. 2016. *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Daniel candra. “system informasi simpan pinjam pada badan usaha milik kampong ( bumkam) tuah negeri kampong pinang sebatang barat”. 2021
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Ety,Dkk. 2019. “Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung.” *Jurnal kesejahteraan social*
- Hamdata, Rivin, Sastro Wantu, Udin Hamim Hamim, and Zulfikar Adjie Adjie. 2021. “PENGELOLAAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJATERAAN MASYARAKAT DESA HUYULA, KECAMATAN RANDANGAN, KABUPATEN POHUWATO, PROVINSI GORONTALO.” *Jambura Journal Civic Education*. doi: 10.37905/jacedu.v1i2.12804.
- Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.
- Kadek, N., Candra, D., Sinarwati, N. K., & Arie, M. (2017). Efektivitas pengelolaan dana pada badan usaha milik desa kerta danu mandara di desa songan a 1, I.
- Karinda, welly, and alfon kimbal. 2020. “TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)”. *Ejournal unsrat*
- Lalono, Ioina. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & partisipasi*, Jakarta : Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Melatyugra, SH., MH., Ninon, Indirani Wauran, Dyah Hapsari Prananingrum, Umbu Rauta, and Yafet Y. W. Rissy. 2021. "Pengelolaan BUMDes: Aspek Hukum Dan Regulasi." *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. doi: 10.24246/jms.v1i22020p215-224.
- Murniati, Murniati, and La Ode Abdul Harlan. 2021. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Di Desa Sindangkasih." *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*. doi: 10.51454/parabela.v1i2.182.
- Moenek,R, & Suwanda,D (2019). Good Governance (Pengelolaan Keuangan Daerah).Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurtang. 2021. "ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA GETI BARU KECAMATAN BACAN BARAT UTARA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Oleh." *Government of Archipelago*.
- Pradnyani, Ni Luh Putu Sri Purnama. 2019. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara." *Sintesa*.
- Pramitari, IGAA, Ketut Nurhayanti, and Si Luh Putu Yulita Suningsih. 2020. "Penerapan Sak Etap Pada Unit Jasa Pengelolaan Sampah Bumdes Desa Buduk." *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*.
- Qudrat-I Elahi, Khandakar. 2009. *UNDP On Good Governance. International Journal of Social Economics*. Vol. 36 No. 12, halaman 1167-1180
- Rahayu, Siti, and Rury Febrina. 2021. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDes Di Desa Sugai Nibung." *Jurnal Trias Politika*.
- Rahmawati, Maulida Putri, and Suwarji Suwarji. 2021. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan BUMDes Pada Masa Pandemi Di Desa Protomulyo Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal." *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*. doi: 10.24076/jspg.v3i1.547.
- Sartika, Euis. 2021. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SUKAMENAK." *ETHOS: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. doi: 10.29313/ethos.v9i1.6555.
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.
- Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDES*,(Jakarta:UAI Press,2019),hlm,2
- Saryono (2010). Metode penelitian kualitatif. Bandung :PT Alfabeta
- Sugiyono (2012). Metode penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa

Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun  
2014

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 1  
Tahun 2015 Tentang Perubahan  
Nama Desa Menjadi Kampung